

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pemerintah dalam pengambilan keputusan internal

Musthofa Amin Khusaini, Heru Fahlevi, Indayani

Universitas Syiah Kuala
E-mail: khusainimusthofa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan kualitas informasi akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi pemerintah dalam pengambilan keputusan internal satuan kerja. Penelitian ini dilakukan pada satuan kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh yang tersebar di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya. Jumlah populasi sebanyak 350 satuan kerja dan sampel sebanyak 229 satuan kerja. Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner kepada kepala satuan kerja, pejabat di bidang keuangan, dan staf di bidang keuangan satuan kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal, penggunaan TIK tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal, dan kualitas informasi akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal.

Kata kunci: Pengambilan Keputusan Internal, Penggunaan Informasi Akuntansi Pemerintahan.

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art29](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art29)

PENDAHULUAN

Informasi akuntansi disediakan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna. Informasi akuntansi mencakup informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Pada pemerintahan di Indonesia, informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen pada dasarnya tersaji pada laporan keuangan pemerintah. Informasi akuntansi keuangan tersaji misalnya pada komponen laporan keuangan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi akuntansi manajemen tercermin pada laporan realisasi anggaran (LRA). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Indonesia menyatakan bahwa pengguna informasi akuntansi pemerintah tidak terbatas pada pengguna eksternal saja. Pengguna informasi akuntansi mencakup kelompok pengguna yang luas antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang diberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan pemerintah itu sendiri selaku penyaji laporan keuangan (KSAP, 2021).

Penelitian yang menguji penggunaan informasi akuntansi pemerintahan dalam pengambilan keputusan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Karno (2017) membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Seperti yang diperkirakan, komponen laporan keuangan yang sering digunakan eksekutif dan pemerintah daerah adalah LRA dan neraca saja. Laporan lain dibuat hanya untuk memenuhi peraturan pemerintah, tetapi sebenarnya tidak digunakan (Karno, 2017).

Di Indonesia, tidak jarang laporan keuangan pemerintah hanya untuk menyelesaikan pertanggungjawaban, padahal seharusnya laporan keuangan digunakan sebagai media pengawasan, manajerial, dan perencanaan (Fontanella, 2010). Hanya komponen laporan keuangan neraca dan LRA saja yang secara rutin digunakan oleh pengguna (Nurkholis & Affandi, 2019). Di tingkat regional Asia Tenggara, meskipun laporan keuangan pemerintah Indonesia memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi daripada negara Malaysia namun pada umumnya tingkat pengungkapan pada kedua negara masih

rendah dan mengindikasikan bahwa kedua negara masih harus meningkatkan level pengungkapan di masa yang akan datang. Masih rendahnya tingkat pengungkapan pada laporan keuangan mengakibatkan rendahnya penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Sukmadilaga, dkk. 2015). Di Swedia dan Italia, para politisi dan pimpinan tinggi pemerintahan tidak memanfaatkan informasi akuntansi akrual yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (Paulsson, 2006). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang secara garis besar menemukan bahwa informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan belum optimal penggunaannya maka penelitian ini penting untuk dilakukan kembali.

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pemerintahan dalam pengambilan keputusan internal. Tujuan khususnya yaitu untuk menguji pengaruh pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal, menguji pengaruh penggunaan TIK terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal, dan menguji pengaruh kualitas informasi akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal. Objek dalam penelitian ini yaitu satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). UAKPA merupakan unit terkecil dari struktur akuntansi pemerintah pusat. Satuan kerja yang dipilih yaitu satuan kerja yang berada pada wilayah paling barat Indonesia yaitu satuan kerja pada Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya.

TINJAUAN LITERATUR

Informasi akuntansi pada sebuah laporan baik di sektor privat maupun sektor publik mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan dan penyediaan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajemen (International Accounting Standards Board (IASB), 2010) (Susanto & Djuminah, 2015). Hampir sama dengan pernyataan tersebut, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi guna mengevaluasi akuntabilitas atau kinerja manajemen (Mardiasmo, 2009), (KSAP, 2021). Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja organisasi yang berguna untuk cakupan pengguna yang luas (pengguna internal dan pengguna eksternal) dalam pengambilan keputusan (International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), 2014).

Penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan hasil berbagai penelitian terdahulu, penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan diantaranya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan tentang akuntansi, latar belakang pendidikan (Fontanella, 2010), tekanan organisasi profesi, masalah nasional dan kurangnya pengetahuan dan pelatihan seputar sistem informasi akuntansi (Paula, dkk. 2016), faktor internal organisasi misalnya faktor beban kerja dan kurangnya artikulasi antara sistem informasi akuntansi dan pelatihan yang cocok pada sistem informasi akuntansi serta sarana komputasi yang memadai, beban kerja yang terlalu berat dan ketidakpahaman pengguna atas informasi akuntansi yang disajikan (Karno, 2017), rendahnya kualitas informasi yang tersedia (Steccolini, 2002), tekanan dari auditor internal dan masyarakat, faktor regulasi (Setyaningrum, dkk. 2020), sistem informasi akuntansi pemerintah tidak terintegrasi dan tidak menghasilkan data akrual secara harian maupun bulanan; SDM yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi masih sedikit, dan pemahaman sumber daya manusia mengenai kegunaan informasi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) masih rendah, laporan keuangan masih belum *full disclosure*, tidak utuh penyajiannya, tidak valid khususnya pada perhitungan aset tetap, regulasi tidak memberikan peran pada informasi yang tersedia pada LKDP, tidak ada aturan yang memaksa untuk menggunakan informasi dari LKPD khususnya pada proses perencanaan dan penganggaran; serta rendahnya komitmen dan pemahaman para pimpinan sebagai pengguna laporan (Efendi, dkk. 2018).

Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas maka dirangkum tiga faktor utama yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pemerintah dalam pengambilan keputusan internal yaitu faktor pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan kualitas informasi akuntansi.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengetahuan Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

Faktor SDM dengan berbagai rinciannya, khususnya pengetahuan pengguna tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan merupakan faktor yang paling banyak diteliti pengaruhnya terhadap penggunaan informasi akuntansi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Sebagai elemen penting dalam organisasi (Mutiana, dkk. 2017) dan pilar utama yang secara terus menerus menjalankan organisasi dalam usaha merealisasikan visi, misi, dan tujuan organisasi (Suwanda, 2015) seharusnya SDM mampu dan mau untuk menangkap berbagai informasi yang tersedia guna menjalankan organisasi termasuk pembuatan berbagai keputusan. Berbagai informasi tersebut di antaranya adalah informasi akuntansi. Secara logis, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang tentang akuntansi dan pelaporan keuangan seharusnya semakin meningkatkan penggunaan oleh orang tersebut informasi akuntansi yang tersedia. Atas dasar alasan logis tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H₁: Pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal.

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penggunaan TIK merupakan penggunaan suatu teknologi dalam pengolahan data menjadi informasi (Indrajit, 2000). Penggunaan TIK saat ini merupakan keharusan karena adanya kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat di berbagai aspek. Peran TIK dalam membantu proses akuntansi pada organisasi telah lama berlangsung. Alasan utama penggunaan TIK adalah efisiensi, berupa penghematan waktu, dan biaya. Alasan lain yaitu peningkatan efektifitas dengan mencapai hasil laporan keuangan yang lebih akurat.

Apabila dilihat dari ilustrasi piramida organisasi maka tugas akuntansi berada pada level paling bawah yaitu operasional dan transaksional dengan ciri pekerjaan yang teknis, berulang, prosedural, standar, serta dapat membuat bosan. Ciri khas utama ini membuat TIK sangat berkaitan erat dengan akuntansi. Peran TIK dalam akuntansi masih penting bahkan semakin penting. Perkembangan pesat TIK sangat mempengaruhi perkembangan ilmu akuntansi. Penggunaan TIK dalam akuntansi tidak hanya dalam pemrosesan transaksi saja. TIK dalam akuntansi digunakan dari tahap awal akuntansi hingga tahap akhir berupa penyajian laporan keuangan, bahkan pengaksesan informasi akuntansi untuk digunakan juga tidak terlepas dari peran TIK.

Atas dasar tersebut maka wajar para peneliti terdahulu menguji pengaruh penggunaan TIK bagi penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Beberapa penelitian terdahulu antara lain menyimpulkan bahwa informasi akuntansi akrual belum bermanfaat oleh instansi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan karena sistem informasi akuntansi pemerintah tidak terintegrasi dan tidak menghasilkan data akrual secara harian maupun bulanan (Efendi dkk., 2018). Terdapat pengaruh yang kuat dan positif pemanfaatan TIK terhadap kualitas laporan keuangan (Dermawan, 2016). Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diusulkan:

H₂: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal.

Kualitas Informasi Akuntansi

Kualitas informasi akuntansi tercermin dalam kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam menyajikan informasi akuntansi khususnya laporan keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (KSAP, 2021). Suatu laporan keuangan tidak dapat memenuhi tujuannya apabila tidak memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan di atas.

Suatu laporan disebut relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan. Laporan keuangan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan informasi secara jujur dan dapat dibuktikan. Laporan keuangan harus

dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dengan instansi sejenis. Laporan keuangan juga harus dapat dipahami oleh pengguna.

Semakin baik informasi akuntansi yang tersedia seharusnya semakin meningkatkan penggunaan informasi akuntansi tersebut dalam pengambilan keputusan. Pernyataan ini didukung dengan hasil beberapa penelitian. Kesesuaian informasi berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan pemerintah (Fetriwahyuni, dkk. 2015). Ini berkaitan kerelevanan suatu informasi akuntansi. Pemakai internal laporan keuangan pemerintah tidak memanfaatkan laporan keuangan pemerintah karena rendahnya kualitas informasi yang tersedia (Steccolini, 2002). Data dalam laporan keuangan masih belum *full disclosure*, tidak disajikan secara utuh, tidak valid khususnya pada perhitungan aset tetap (Efendi, dkk. 2018) sehingga penggunaannya menjadi rendah. Atas dasar hal tersebut maka dinyatakan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kepala satuan kerja, pejabat di bidang keuangan, dan staf di bidang keuangan satuan kerja. Kepala satuan kerja dipilih karena kepala satuan kerja mempunyai peran paling tinggi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dibuat di instansinya. Pejabat dan staf di bidang keuangan dipilih karena mereka yang paling banyak terlibat dalam pengambilan keputusan bidang keuangan satuan kerja. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh satuan kerja pengguna APBN lingkup wilayah KPPN Banda Aceh yang tersebar pada Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya yang berjumlah sekitar 350 Satuan kerja (jumlahnya fluktuatif dari tahun ke tahun). Sampel dipilih dengan teknik *probability sampling (simple random sampling)*. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N.(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Error

Dengan batas toleransi error sebesar 5% maka ditentukan jumlah sampel minimal sebanyak 187 satuan kerja, namun dengan alasan jumlah populasi yang tidak stabil dari tahun ke tahun maka ditentukan secara acak jumlah sampel sebesar 229 satuan kerja agar memenuhi jumlah minimal satker berdasarkan rumus slovin dan mengakomodir jumlah populasi yang tidak stabil tersebut.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal (PIAPKI) yang diukur dengan penggunaan informasi operasi, penggunaan informasi akuntansi keuangan, dan penggunaan informasi akuntansi manajemen. Variabel independen terdiri dari (a) pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan (PAPKP) yang diukur dari pengetahuan yang bersifat deklaratif dan pengetahuan prosedural, (b) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (PTIK) yang diukur dari penggunaan TIK dalam pengolahan data dan penggunaan TIK dalam proses penyaluran data/informasi, dan (c) kualitas informasi akuntansi (KIA) yang diukur dari kerelevanan, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemampuan untuk dipahami.

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda dengan maksud memperoleh bukti empiris tentang pengaruh 3 (tiga) variabel independen, yakni PAPKP, PTIK, dan KIA terhadap PIAPKI. Penentuan ditolaknyanya hipotesis mengacu pada nilai signifikansinya (Sig.) dengan patokan $\alpha=5\%$.

HASIL DAN DISKUSI

Pengolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda menghasilkan informasi yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian dengan Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (b)	t	Sig.
<i>Constanta</i>	13,941	4,824	0,000
<i>PAPKP</i>	0,271	2,260	0,026
<i>PTIK</i>	0,237	,882	0,380
<i>KIA</i>	0,748	6,760	0,000

Koefisien korelasi R = 0,802

Koefisien Determinasi R² = 0,643

Sig F = 0,000

Persamaan Regresi:

$$PLAPKI = 13,941 + 0,271 PAPKP + 0,237 PTIK + 0,748 KIA$$

Catatan: Signifikan pada level $\alpha=5\%$.

PIAPKI = Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Internal

PAPKP = Pengetahuan Tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan

PTIK = Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

KIA = Kualitas Informasi Akuntansi

Sumber: Hasil olah data (2021)

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,802 menunjukkan bahwa derajat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebesar 80,2%, artinya variabel independen pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, penggunaan TIK, dan kualitas informasi mempunyai hubungan kuat dengan variabel dependen PIAPKI hal ini disebabkan persentase hubungan yang lebih dari 50%.

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,643 atau 64,3% mengandung arti variasi yang terjadi pada variabel penggunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan intern sebesar 64,3% dipengaruhi atau disebabkan oleh perubahan yang terjadi secara bersama-sama pada variabel pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, penggunaan TIK, dan kualitas informasi akuntansi sedangkan 35,7% sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain.

Konstanta sebesar 13,941 pada persamaan regresi di atas mempunyai arti jika pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, penggunaan TIK, dan kualitas informasi akuntansi dianggap konstan maka besarnya variabel PIAPKI adalah 13,942 satuan pada skala interval.

Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya. Nilai Sig. < 0,05 artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai Sig. > 0,05 artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa dua variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang kurang dari 0,05 atau 5%. Satu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikansinya yang lebih dari 0,05 atau 5%. Variabel pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,026 (berpengaruh signifikan). Variabel penggunaan TIK memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,380 (tidak berpengaruh signifikan). Variabel kualitas informasi akuntansi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (berpengaruh signifikan).

Untuk melihat arah pengaruhnya maka dilakukan dengan melihat nilai koefisien regresinya. Apabila nilai koefisien regresi bertanda positif maka kenaikan/penurunan variabel independen sejalan dengan kenaikan/penurunan variabel dependen. Apabila nilai koefisien regresinya bertanda negatif maka kenaikan/penurunan variabel independen tidak sejalan (berlawanan) dengan kenaikan/penurunan variabel dependen. Berdasarkan tabel 1 di atas, semua variabel independen mempunyai nilai koefisien regresi yang bertanda positif.

Pengaruh Pengetahuan tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Internal

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 1, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan terhadap sebesar 0,026 atau 2,6%, yang berada di bawah 0,05 atau 5%. Hal ini bermakna bahwa variabel pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap PIAPKI. Nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,271 bermakna bahwa semakin besar pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, maka semakin besar PIAPKI. Hal ini sesuai dengan hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan berpengaruh positif terhadap PIAPKI.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fontanella (2010) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang akuntansi berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan pemerintah daerah bagi proses perencanaan pembangunan daerah. Fontanella melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian dengan objek penelitian Pemerintah Kota Pekanbaru (Fetriwahyuni, dkk. 2015), dengan kesimpulan pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Pada pemerintahan-pemerintahan kota di Portugis diperoleh kesimpulan kurangnya pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi menjadi faktor penghambat penggunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan internal (Paula, dkk. 2016).

Kesamaan hasil penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu menegaskan bahwa pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan telah menjadi faktor yang konsisten mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pemerintahan, baik di pemerintahan di Indonesia maupun di negara lain. Adanya kesamaan hasil penelitian ini dan beberapa penelitian terdahulu disebabkan oleh beberapa hal misalnya waktu pelaksanaan penelitian yang relatif tidak berselang lama dan objek penelitian yang hampir sama (sektor pemerintahan).

Pengaruh Penggunaan TIK terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Internal

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 1, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel penggunaan TIK terhadap PIAPKI sebesar 0,380 atau 38%, yang lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hal ini bermakna bahwa variabel penggunaan TIK tidak berpengaruh signifikan terhadap PIAPKI. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa penggunaan TIK berpengaruh positif terhadap PIAPKI.

Dengan tidak terbuktinya penggunaan TIK berpengaruh signifikan terhadap PIAPKI maka dapat disimpulkan bahwa PIAPKI tidak akan semakin meningkat atau menurun bila penggunaan TIK para pengguna informasi akuntansi ditingkatkan. Dengan kata lain, untuk meningkatkan PIAPKI tidak dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan TIK.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa faktor internal organisasi seperti sarana komputasi yang memadai berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi oleh pengguna baik informasi dari basis akrual maupun kas (Karno, 2017). Perbedaan hasil ini disebabkan oleh Karno yang menguji pengaruh faktor tersebut secara bersama-sama dengan faktor internal lain. Karno tidak menguji pengaruh sarana komputasi yang memadai (penggunaan TIK) secara parsial terhadap penggunaan informasi akuntansi akrual maupun kas, sedangkan penelitian ini menguji faktor tersebut secara parsial terhadap PIAPKI.

Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini bisa disebabkan oleh faktor pelaksanaan penelitian maupun kenyataan di lapangan. Dari sisi pelaksanaan penelitian, penelitian ini hanya menyediakan tiga item pernyataan untuk variabel penggunaan TIK sedangkan variabel lain tersedia enam, sembilan, dan dua belas item pernyataan. Sedikitnya jumlah item pernyataan kuesioner untuk variabel penggunaan TIK ini bisa jadi menjadi penyebab hasil regresi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap PIAPKI.

Faktor lain yang menyebabkan tidak ada pengaruh yang signifikan variabel penggunaan TIK terhadap penggunaan informasi akuntansi adalah implementasi TIK yang sudah lama dilakukan pada satuan kerja. Terhitung sejak Standar Akuntansi Pemerintahan pertama kali diterapkan, sejak saat itu pula

TIK telah digunakan pada unit-unit pemerintah pusat. Penggunaan TIK lahir sejak lahirnya akuntansi pemerintahan di Indonesia. Seiring dan sejalannya dua variabel ini seolah-olah menyatakan bahwa penggunaan TIK dan penggunaan informasi akuntansi adalah satu kesatuan, bukan dua variabel yang berbeda sehingga hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara dua variabel tersebut.

Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Internal

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 1, diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh variabel kualitas informasi akuntansi terhadap PIAPKI sebesar 0,000 atau 0%, yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini bermakna bahwa variabel kualitas informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap PIAPKI. Hal ini sesuai dengan hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa kualitas informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap PIAPKI.

Dengan terbuktinya kualitas informasi akuntansi mempunyai pengaruh terhadap PIAPKI maka dapat disimpulkan bahwa PIAPKI akan semakin meningkat bila kualitas informasi akuntansi para pengguna informasi akuntansi ditingkatkan. Untuk meningkatkan PIAPKI dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas informasi akuntansi.

Hasil penelitian ini sama hasilnya dengan sebuah penelitian yang mengatakan bahwa pemakai internal laporan keuangan pemerintah di Italia tidak memanfaatkan Laporan keuangan pemerintah karena rendahnya kualitas informasi yang tersedia (Steccolini, 2002). Hal ini juga sejalan dengan hasil sebuah penelitian yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan informasi akuntansi akrual belum bermanfaat oleh instansi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan adalah data dalam laporan keuangan masih belum *full disclosure*, tidak disajikan secara utuh, tidak valid khususnya pada perhitungan aset tetap (Efendi et al., 2018). Alasan ini berkaitan faktor kualitas informasi akuntansi. Dua penelitian di atas adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menegaskan apa yang sudah disimpulkan pada penelitian-penelitian tersebut di atas.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap PIAPKI. Penggunaan TIK tidak berpengaruh signifikan terhadap PIAPKI. Kualitas informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap PIAPKI. Keterbatasan penelitian ini yaitu, pertama, kesimpulan yang diambil hanya mengacu pada data primer dari kuesioner sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi apabila jawaban responden tidak sama dengan keadaan sebenarnya. Kondisi ini merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan karena di luar kemampuan peneliti. Kedua, hanya terdapat tiga variabel independen (pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, penggunaan TIK, dan kualitas informasi akuntansi) yang diuji pengaruhnya terhadap PIAPKI. Hal ini menyebabkan terabaikannya variabel-variabel lain yang mempengaruhi PIAPKI.

Berdasarkan fenomena dan keterbatasan yang ada, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, bagi para satuan kerja lingkup KPPN Banda Aceh, untuk meningkatkan PIAPKI, perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan pengetahuan tentang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan karena dua variabel ini merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi PIAPKI.

Untuk penelitian selanjutnya, perlu digali faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi PIAPKI misalnya faktor eksternal organisasi, faktor beban kerja, faktor karakteristik individu pengguna informasi akuntansi, faktor ada/tidaknya regulasi yang memaksa penggunaan informasi akuntansi, faktor komitmen pimpinan, dan lain-lain.

DAFTAR REFERENSI

Dermawan, J. (2016). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pada satuan kerja kementerian negara/ lembaga lingkup kantor pelayanan perbendaharaan negara Banda Aceh*. Tesis. Aceh. Universitas

Syiah Kuala.

- Efendi, R., Dewi, F. G., & Gamayuni, R. R. (2018). Usefulness analysis of accrual based accounting information on local government financial statement: A qualitative study. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(11), 10–21.
- Fetriwahyuni, R., Hasan, M. A., & Desmiyawati. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna dalam pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah kota pekanbaru, *JOM Fekon*, 2 (2), 1-13.
- Fontanella, A. (2010). Analisis pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(2), 22–30.
- Indrajit, R. E. (2000). *Manajemen sistem informasi dan teknologi informasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- IASB. (2010). International accounting standards board
- IPSASB. (2014). International public sector accounting standards board
- KSAP. (2021). Standar akuntansi pemerintahan (SAP) 2021.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta. Andi.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida, Z. (2017). Pengaruh sistem pengendalian intern, teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada satker di lingkungan kementerian agama kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 151–167.
- Nurkholis, N., & Affandi, A. T. (2019). The utilization of government financial statements by executives: The case of local governments in Indonesia. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 27(71), 56–78.
- Paula, S., Nogueira, S., Margarida, S., & Jorge, F. (2016). Explanatory factors for the use of the financial report in decision-making: Evidence from local government in Portugal, *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 19(2), 216–226.
- Paulsson, G. (2006). Accrual accounting in the public sector: experiences from the central government in Sweden. *Financial Accountability and Management*, 22(1), 47–62.
- Setyaningrum, D., Siswanto, D., & Darmastuti, D. (2020). Factors affecting the usefulness of governments' financial statements in Indonesia. *International Journal of Inovation, Creativity and Change*, 12(4), 117–134.
- Steccolini, I. (2002). Local government annual report: An accountability medium?. *SSRN Electronic*
- Sukmadilaga, C., Pratama, A., & Mulyani, S. (2015). Good governance implementation in public sector: exploratory analysis of government financial statements disclosures across ASEAN countries. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 211(September), 513–518.
- Susanto, D., & Djuminah. (2015). The usefulness of local government financial statements for regional development planning process (an empirical study against the head of the district development planning agencies in Java and Madura). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 211(September), 75–80.
- Suwanda, D. (2015). Factors affecting quality of local government financial statements to get unqualified opinion (WTP) of audit board of the republic of Indonesia (BPK). *Research Journal of Finance and Accounting*. 6(4), 139–157.
- Wibowo, K. P. (2017). Kegunaan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan internal oleh unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. 2(4), 73-91.